BAB II

RUANG LINGKUP PERUSAHAAN

2.1 SEJARAH SINGKAT PERUSAHAAN

Sejak masa penjajahan Belanda sampai tahun 1942, di Indonesia telah dikenal suatu badan perusahaan yang menyediakan tenaga listrik, baik milik pemerintah, daerah otonom (*Gemete*) maupun swasta ataupun patungan antara pemerintah dan swasta.

Di Jawa Barat khususnya kota Bandung, perusahaan yang mengelola penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yaitu *Bandoengsche Elektriciteit Maatschappij* (BEM), yang berdiri perusahaan perseroan *Gemeenschappelijk Electriciteit Bedrijf Voor Bandoeng* (GEBEO) yang menggantikan BEM dengan Akte Pendirian Notaris Mr. Andrian Hendrik Van Ophuisen, No.213 tanggal 31 Desember 1919.

Pada masa penjajahan Jepang (1942 - 1945), pendistribusian tenaga listrik dilaksanakan oleh *Djawa Denki Djogyo Sha Bandoeng Shi Sa*, dengan wilayah diseluruh Pulau Jawa.

Setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, di Indonesia mengalami periode perjuangan fisik sampai tiba saatnya penyerahan kedaulatan RI dari Pemerintah Hindia Belanda.

Pada tahun 1954 merupakan titik tolak dan awal dari pengelolaan dan penguasaan pelistrikan di seluruh Indonesia yang dikuasai oleh Pemerintah

Republik Indonesia, karena pada tahun tersebut dimulai Nasionalisasi Perusahaan Asing di Indonesia.

Maka pada tanggal 7 Desember 1957 GEBEO diambil alih oleh pemerintah RI, yang dikukuhkan dengan Peraturan Pemerintah No.86 tahun 1958 juga peraturan pemerintah No.18 tahun 1959 tentang Penentuan Perusahaan Listrik dan Gas Milik Belanda yang pada tahun 1961 berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 67 tahun 1961 dibentuk Badan Pimpinan Umum Milik Negara (BPU-PLN), sebagai wadah kesatuan pimpinan PLN. Kemudian istilah PLN Bandung diganti dengn nama PLN Eksploitasi XI sebagai kesatuan BPU-PLN d Jawa Barat kecuali DKI Jaya dan Tanggerang. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.18 tahun 1972 tentang Perusahaan Umum Listrik Negara, menyebutkan bahwa status PLN menjadi Perusahaan Umum Milik Negara.

Berdasarkan Peraturan Mentri No.013/RT/1957 tanggal 8 September Tahun 1957 tentang organisasi dan tata kerja. Perusahaa Umum Listrik Negara, maka PLN mengadakan reorganisasi menyangkut nama, tugas dan wilayah kerja didaerah. Kemudian berdasarkan Pengumuman PLN Eksploitasi XI diubah namanya menjadi Perusahaan Umum Listrik Negara Distribusi Jawa Barat.

Dengan adanya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 23 tahun 1994 tanggal 16 Juni 1994 tentang pengalihan bentuk Perusahaan Umum Listrik Negara menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), maka bentuk Perusaaan Umum Listrik Negara Distribusi Jawa Barat menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dengan sebutan PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat sejak 30 Juli 1994 sesuai dengan akte pendirian.

PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat yaitu meliputi 15 cabang (Bandung, Cimahi, Majalaya, Garut, Tasikmalaya, Cirebon, Purwakarta, Bogor, Sukabumi, Cianjur, Sumedang, Karawang, Banten, Bekasi, Depok) dan satu Unit Pengatur Distribusi.

Sejalan dengan kebijakan restrukturisasi sektor ketenagalistrikan dan dalam rangka optimasi *corporate Gain* serta penyusunan organisasinya berdasarkan *value chain,* sehingga tugas pokok dan susunan organisasi seperti yang telah ditetapkan dengan Keputusan Direksi Perusahaan Umum Listrik Milik Negara No. 153.K/023/DIR/1993 perlu disempurnakan lagi disertai perubahan status dan nama mejadi PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan meliputi wilayah kerja cabang – cabang PLN, Unit Pelayanan Pelanggan, Unit Pelayanan Jaringan, Ranting dan Kantor juga diseluruh Wilayah Provinsi Jawa Barat.

UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN UNIKOM

2.2 Tempat dan Kedudukan Perusahaan

PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten bertempat di Gedung Bale Sumur Bandung jalan Cikapundung Barat No 2 bandung, yang lokasinya dekat dengan pusat kota bandung (Alun-alun Bandung).

2.3 Bentuk dan Badan Hukum Perusahaan

PT PLN merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dengan adanya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 23 tahun 1994 tanggal 16 Juni 1994 tentang pengalihan bentuk Perusahaan Umum Listrik Negara menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), maka bentuk Perusaaan Umum Listrik Negara Distribusi

Jawa Barat menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dengan sebutan PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat sejak 30 Juli 1994 sesuai dengan akte pendirian. kemudian setelah ada pemekaran provinsi Jawa barat menjadi dua provinsi yaitu Jawa Barat dan Banten, maka sebutan PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat ditambah menjadi PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten, karena ada sebagian APJ PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat berada diwilayah Banten.

2.4 Bidang Pekerjaan Perusahaan

PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten sebagai kantor pusat pelayanan jasa menyediaan ketenaga listrikan yang jangkauanya meliputi wilayah provinsi Jawa Barat dan Banten, yang membawahi kantor – kantor cabang Area Pelayanan Jaringan (APJ) diwilayah tersebut.

2.5 Bidang Pekerjaan / Divisi Tempat Kerja Praktek

Bidang / divisi tempat kerja praktek berlangsung di bagian kepegawaian yaitu pada administrasi SDM bidang SDM dan organisasi, khususnya dibagian kesehatan pegawai dan pensiun PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten.

2.6 Uraian Tugas pada Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Perusahaan merupakan suatu gambaran yang menunjukan suatu pekerjaan yang harus dilakukan oleh setiap bagian atau

anggota. Struktur Organisasi PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat merupakan organisasi garis, fungsional dan staf jenjang manajemen, meliputi Unsur Pimpinan, Unsur Pengawas dan Unsur Pelaksana, selain itu ada juga control interen yang berada dibawah serta tanggung jawab langsung kepada pimpinan, dapat dilihat secara keseluruhan bahwa susunan organisasi di PT PLN (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Barat sebagai berikut :

a) Unsur Pimpinan adalah General Manager
b) Unsur Pembantu Pimpinan yang meliputi bidang – bidang :
    1. Perencanaan
    2. Distribusi
    3. Niaga
    4. Keuangan
    5. SDM dan Organisasi
    6. Umum
c) Unsur Pelaksanaan dilaksanakan oleh Auditor Internal
d) Unsur Pelaksanaan meliputi :
    1. Area Pelayanan Jaringan (APJ)/ Unit yang terdiri dari :
        Unit Pelayanan Jaringan
        Unit Pelayanan Pelanggan
    2. Area Pelayanan Distribusi (APD)

Uraian Tugas

Tujuan distribusi adalah mengusahakan pendistribusian tenaga listrik dalam jumlah dan mutu yang memadai untuk masyarakat.

PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Pelaksanaan dan perencanaan pembangunan sarana pendistribusian tenaga listrik

b. Pengoperasian dan perencanaan system pendistribusian tenaga listrik

c.Perencanaan dan pembinaan penjualan tenaga listrik dan pelayanan pelanggan

d. Pengolahan sumber daya manusia, keuangan dan administrasi

e. Pengawasan pelaksanaan pendistribusian

GENERAL MANAGER

General manager bertanggung jawab atas pengelompokan usaha, melalui optimalisasi seluruh sumber daya secara efisien dan sinergis serta menjamin penerimaan, hasil penjualan tenaga listrik, peningkatan kualitas pelayanan, peningkatan profitabilitas serta iklim kerja yang produktif.

PEMBANTU GENERAL MANAGER

1.Manajer Perencanaan

Tugasnya menjamin tersedianya perencanaan perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), serta pengembangan usaha lain yang

menunjang bisnis inti perusahaan untuk meningkatkan pendapatan dan efisien perusahaan.

2. Manajer Niaga

Tugas pokoknya menjamin penjualan tanaga listrik, pengembangan pemasaran dengan melakukan riset pasar / inovasi di dalam pengembangan penjualan tenaga listrik dengan harga yang kompotitip yang berorientasi kepada kebutuhan pelanggan, serta transaksi pembelian tenaga listrik yang menguntungkan bagi Unit Bisnis.

3. Manajer Distribusi

Tugas pokoknya menjamin kontinuitas pengusahaan listrik dengan efisien serta mutu dan kehandalanyang baik dan dukungan logistic bagi operasional pengusahaan tenaga listrik di unit pelaksanaan.

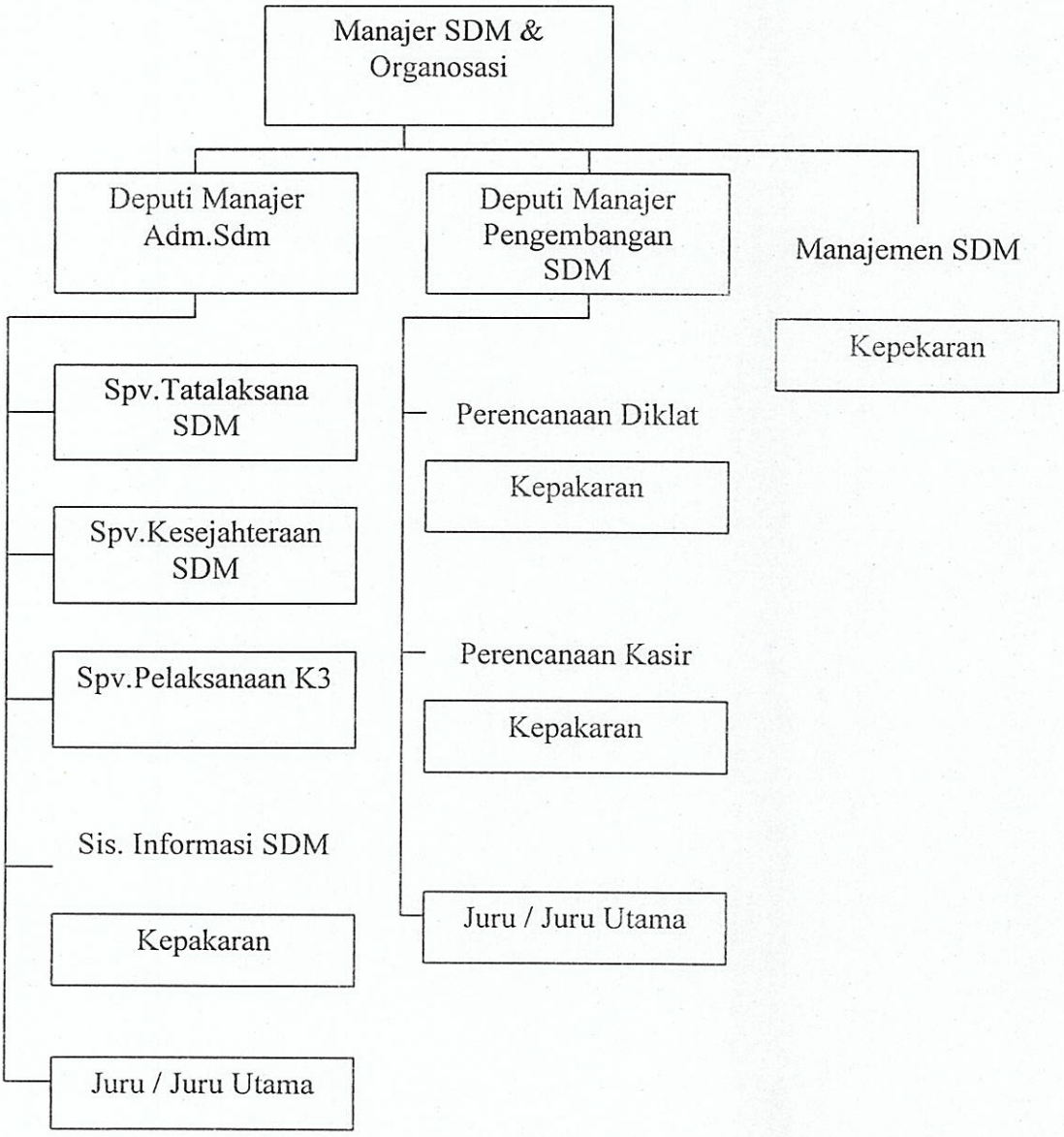
4.Manajer Keuangan

Tugas pokoknya menjamin penyelenggaraan pengelolaan pendanaan dan pengelolaan arus kas secara akurat, melaksanakan pengembangan dan pembinaan system manajemen keuangan sesuai dengan prinsip – prinsip manajemen keuangan yang baik serta menjamin akurasi dan ketepatan waktu penyajian akutansi dan pelaporan keuangan.

5. Manajer Komunikasi, Hukum Dan Administrasi

Tugas pokoknya menjamin operasional bidang kesekretarisan, rumah tangga perkantoran, pelaksanaan law inforcement secara konsisten, pembekuan citra perusahaan melalui aktifitas kehumasan, pelaksanaan protokuler dan

komunikasi dengan stake holder, pengelola sarana kerja dan mewakili perusahaan dalam proses hukum.



II.1 Struktur Organisasi PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten Bidang SDM dan Organisasi

6. Manajer Bidang Sumber Daya Manusia Dan Organisasi

Tugasnya menjamin tersedianya SDM yang berkualitas serta kompeten dalam bidang tugasnya melalui recruitment, penempatan, pembinaan, dan pengembangan SDM secara komperhenshif dan terencana serta pengembangan organisasi sesuai kebutuhan dan menjamin terselenggaranya analisis jabatan dan evaluasi jabatan, administrasi dan pembinaan keselamatan kerja.

Adapun manajer ini membawahi 2 (dua) orang Deputi manajer, beberapa Fungsional (kepakaran) dan beberapa staf lainnya, sebagai berikut :

1.Deputi Manajer Administrasi SDM

1.1. Tata Laksana SDM

1.2. Kesejahteraan SDM

1.3. Pelaksanaan K3

1.4. Sistem Informasi SDM

2. Deputi Manajer Pengambangan SDM

2.1. Perencanaan Diklat

2.2. Perencanaan karier

3. Manajemen SDM

6.1. Deputi Manajer Administrasi SDM

Tugasnya bertanggung jawab atas terlaksananya pengelolaan penghasilan dan emolemen, kesejahteraan dan kesehatan pegawai serta pensiunan, dan sistem pengelolaan data pegawai yang *up to date* dan penyajian informasi SDM yang akurat serta pembinaan K3.

Supervisor Tatalaksana SDM

Tugas pokoknya dalam melakukan pelaksanaan penerimaan, pengangkatan, penempatan dan pemberhentian pegawai serta pengolah data kepegawaian, yang dibantu oleh Juru Utama / juru sebagai berikut:

- Pengadaan dan mutasi pegawai

  Bertugas membuat SK mutasi pegawai, penerimaan pegawai yang menjadi wewenang PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten serta menyelenggarakan upacara pergantian pejabat, pelepasan pension serta menerima penghargaan kegiatan kerja.

- Pengolahan data pegawai

  Bertugas memutakhirkan biodata pegawai yang ada di wilayah kerja PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten.

- Tata Usaha Pegawai

  Bertugas menerima, menghimpun dan mengagendakan surat-surat penting lainnya serta mengarsipkan data pendukung biodata pegawai.

- Arsip Data Pegawai

  Bertugas mengarsipkan data pegawai yang ada diwilayah kerjanya dan mengikuti secara bertahap dan terus menerus guna memudahkan pencarian bila sewaktu-waktu dibutuhkan.

- Administrasi SDM

  Bertugas mengatur dan mengkoordinasi kegiatan pegawai, mengagendakan surat masuk dan surat keluar serta mendistribusikan sesuai diposisi tujuan.

Supervisor Kesejahteraan SDM

Tugas pokoknya untuk melaksanakan dan membina kegiatan administrasi gaji, upah dan kesejahteraan pegawai serta pensiunan.

- Administrasi gaji dan emolument

  Bertugas mengoreksi, meneliti dan menghitung daftar gaji pegawai / pensiun beserta tunjangan penghasilan lainnya agar tidak terjadi kekeliruan.

- Kesejahteraan Pegawai dan Pensiun

  Bertugas membuat daftar nama pegawai yang memperoleh cuti, uang penghargaan, membuat bukti angsuran PUMP - KPR, serta memelihara kesehatan pegawai / pensiun dan keluarganya.

Supervisor K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja)

Tugas pokoknya menyiapkan, mengevaluasi sistem dan prosedur pelaksanaan K3 dan menyusun kebutuhan perlengkapan, peralatan K3 serta menyiapkan kelengkapan administrasi kecelakaan kerja.

Sistem Informasi SDM (Kepakaran)

Merupakan fungsional Ahli Muda / Madya di bidang Administrasi SDM, yang memiliki kewajiban dan tanggung jawab sesuai dengan keahlian dan keilmuannya untuk memecahkan masalah dan memberikan alternatif pemecahan masalah dengan tuntutan inovatif atau kreativitas, yang dapat diterapkan dan

berguna untuk pengembangan perusahaan khususnya pada sistem informasi (SDM).

Deputi Manager Pengembangan SDM

Uraian tugas yaitu bertanggung jawab atas terlaksananya pengembangan SDM yang berkualitas dan kompeten melalui jenjang karir yang jelas, dan mempunyai beberapa jabatan fungsional sebagai berikut :

Perencanaan Diklat (Kepakaran)

Bertanggung jawab atas terlaksananya pengembangan kualitas SDM yang mengacu pada tuntutan organisasi maupun kompetensi, melalui sistem training (latihan) yang terstruktur maupun capacity building.

Pengembangan Karier (Kepakaran)

Bertanggung jawab atas terlaksananya pengembangan SDM sesuai kompetensi, melalui sistem karier yang jelas.

Manajemen SDM (Kepakaran)

Merupakan jabatan fungsional Ahli / Ahli Muda / Ahli Madya di bidang organisasi dan sumber daya manusia, yang memiliki kewajiban dan tanggung jawab sesuai dengan keahlian atau keilmuannya untuk memecahkan masalah dan memberikan alternatif memecahkan masalah dengan tuntutan inovatif atau kreativitas, yang dapat diterapkan dan berguna untuk pengembangan perusahaan khususnya pada manajemen SDM.

Unsur Pengawas Dipimpin oleh Kepala Audit Internal

Tugas pokok membantu pimpinan dalam menyelenggarakan pembinaan dan penilaian atas sistem pengendalian manajemen maupun operasional serta memberikan rekomendasi bagi perbaikan dan kemajuan perusahaan.

Unsur Pelaksanaan Manager Meliputi :

1. Manajer APJ

Tugas pokoknya menjamin kualitas, kuantitas dan efisiensi pendistribusian tenaga listrik, pencapaian penjualan tenaga listrik, pelayanan dan ketatausahaan langganan serta administrasi penunjang lainnya dengan berorientasi kepada pemenuhan kepuasan pelanggan serta bertanggung jawab atas pengelolaan pemeliharaan seluruh asset perusahaan yang menjadi tanggung jawab unitnya (meliputi unit pelayanan pelanggan dan unit pelayanan jaringan)

2.Manajer UP

Tugas pokoknya adalah menjamin kualitas, kontinuitas distribusi tenaga listrik dengan proses yang rendah, berorientasi kepada pemenuhan kebutuhan pelanggan serta bertanggung jawab atas pengelolaan dan pemeliharaan seluruh asset perusahaan yang menjadi tanggung jawab unitnya.


UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
UNIKOM